BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang.(Yesie, 2019)

Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya kabupaten yang merupakan daerah tertinggal tersebar di wilayah Indonesia. Di tahun 2020 masih terdapat 62 daerah tertinggal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Isu kesenjangan wilayah ini juga terkait dengan isu pemerataan pembangunan. Isu pemerataan pembangunan menjadi suatu keniscayaan bila kita cermati komparasinya dengan perkembangan kawasan regional, melalui peringkat indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI), yang dirilis *World Economic Forum* (WEF) tahun 2018. Secara umum, WEF melihat negara-negara berkembang menunjukkan peningkatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Dari 77 negara berkembang, Indonesia menempati peringkat ke-36 indeks pemerataan pembangunan (peringkat ke-22 di tahun 2017), di bawah Malaysia (peringkat ke-13 tahun 2018 dan ke-16 tahun 2017), Thailand (peringkat ke-17 tahun 2018 dan ke-12 tahun 2017) dan Vietnam (peringkat ke-33 di tahun 2018) (Sumirat, 2019)

Untuk melepaskan status sebagai daerah tertinggal, Kabupaten melakukan berbagai pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik di berbagai aspek. Berdasarkan UU no 25 tahun 2004, pembangunan seharusnya besifat adil dan merata, namun di daerah ini pembangunan yang ada masih bersifat terpusat. Pembangunan infrastruktur daerah yang tidak merata, terutama di bidang pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan kesehatan tentunya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat.(Yesie, 2019)

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini berimplikasi terhadap kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang dilakukan untuk menyusun sejumlah rencana pembangunan di suatu wilayah seperti menentukan anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya. Tujuannya agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan pemerintah setempat. Kegiatan musrenbang umumnya membahas isu strategis yang ada, proses-proses yang telah dijalani pada tahun tersebut, capaian-capaian target dan sasaran dari Pemerintah Kota/Kabupaten setempat. Setelah itu baru menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD itulah yang kemudian akan digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Funny Amalia Sari, S.S., M.Hum selaku Kabid, pembangunan di Kabupaten Kuningan masih belum maksimal dan merata, ini dibuktikan dengan 13 dari 32 Kecamatan di Kabupaten Kuningan masih dalam kategori tertinggal, baik itu dari tingkat stunting, tingkat pendidikan (diatas SMA), jumlah pengangguran,

index Pembangunan Manusia dan jumlah penerima bantuan pangan. Hal tersebut ditunjang dengan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Kuningan bahwa angka kemiskinan di Kuningan meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 sebesar 11,41% meningkat menjadi 12,82% pada tahun 2020 dan 13,10% pada tahun 2021. Demikian pula dengan tingkat pengangguranya yang terus meningkat mencapai 9,68% pada tahun 2019. Naik 11,22% pada tahun 2020 menjadi 11,68% terjadi pada tahun 2022. Fakti ini menjadi gambaran buat kami bahwa perencanaan kami belum berjalan dengan bailk. Tentu ini menjadi pekerjaan bagi kami untuk melakakukan pemeratan pembangunan, namun kami belum bisa menentukan kecamatan mana dan prioritasnya apa yang harus dieksekusi dengan cepat. Adapun sejauh ini penentuan daerah yang diprioritaskan akan ditentukan pada saat rapat tahunan, kami harap adanya sistem yang dapat membantu kami dalam menentukan prioritas pembangunan yang objektif secara cepat dan tepat sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Febianti Putri dkk pada tahun 2024 dengan judul penelitian “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA KAMOJING MENGGUNAKAN METODE MOORA (MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION OF RATIO ANALYSIS)” penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (MOORA) untuk menentukan prioritas pembangunan di Desa Kamojing. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepadatan penduduk, waktu pelaksanaan, dan biaya pembangunan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pembangunan jembatan di RW 01 menjadi prioritas utama dengan nilai tertinggi sebesar 3,276. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk mempercepat pengambilan keputusan yang positif, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pembangunan di desa.(Adi Permana et al., 2024)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen Sistem Pendukung Keputusan lain), sistem pengetahuan (repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada Sistem Pendukung Keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan) (Sumarno, S.M., & Harahap, 2020)

Multi-Objective Optimization on The Basic of Ratio Analysis(MOORA) adalah sistem dengan multi-objektif, yang di dalamnya memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan [5]. MOORA melakukan optimalisasi terhadap atributatribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika yang kompleks, sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang diinginkan. Metode ini melakukan pemisahan subjektifitas dari suatu proses penilaian ke bentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengambilan keputusan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Metode ini juga memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengolahan variabelnya.(Rosita & Apriani, 2022)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengusukkan sebuah penelitian dengan judul **"Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Skala Prioritas Kegiatan Pembangunan Di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Menggunakan Metode Moora Berbasis Web (Studi Kasus : Bappeda Kabupaten Kuningan)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan meningkat selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2019 sebesar 11,41% meningkat menjadi 12,82% pada tahun 2020 dan 13,10% pada tahun 2021 sertya tingkat pengangguranya yang terus meningkat mencapai

9,68% pada tahun 2019. Naik 11,22% pada tahun 2020 menjadi 11,68% terjadi pada tahun 2022, salah satu penyebabnya adalah kecamatan yang diprioritaskan untuk menerima bantuan dalam rangka pembangunan daerah kurang tepat sasaran.

2. Pembangunan di Kabupaten Kuningan masih belum maksimal dan merata, ini dibuktikan dengan 13 dari 32 Kecamatan di Kabupaten Kuningan masih dalam kategori tertinggal, hal ini dikarenakan tidak adanya sistem yang dapat membantu pihak BAPPEDA dalam menentukan prioritas pembangunan yang objektif secara cepat dan tepat untuk masing masing kecamatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem informasi untuk memastikan kecamatan yang diprioritaskan menerima bantuan dalam rangka pembangunan daerah sesuai program yang sudah disediakan oleh pemerintah?
2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem penunjang keputusan dalam menentukan prioritas pembangunan dengan mengimplementasikan metode *MOORA*?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah pada penelitian ini. Berikut ini adalah batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan :

1. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan yang berada diwilayah kerja Kabupaten Kuningan .
2. Sistem yang dibuat memiliki fungsi untuk membantu memberikan saran untuk penunjang keputusan dalam menentukan kecamatan yang diprioritaskan menerima bantuan dalam rangka pembangunan daerah sesuai program yang sudah disediakan oleh pemerintah.
3. Metode yang digunakan untuk membantu dalam tahap penentuan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan adalah *MOORA*.

4. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut :

   a. **Tingkat Stunting (Atribut Cost)** Tingkat Stunting, dilakukan penilaian oleh petugas kecamatan dimana penilaian dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori "Kurang" (berbobot 3) jika jumlah stunting lebih dari 20% dari jumlah balita, yang mengindikasikan kondisi gizi buruk tinggi sehingga membutuhkan penanganan prioritas. Kedua, kategori "Sedang" (berbobot 2) jika jumlah stunting berkisar lebih dari 10% sampai dengan 20% dari jumlah balita. Ketiga, kategori "Baik" (berbobot 1) jika jumlah stunting tidak lebih dari 10% dari jumlah balita, yang menunjukkan kondisi ideal.

   b. **Tingkat Pendidikan Diatas SMA (Atribut Benefit)** Tingkat Pendidikan, dilakukan penilaian oleh petugas kecamatan dimana penilaian dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori "Baik" (berbobot 3) jika penduduk usia produktif dengan pendidikan diatas SMA lebih dari 20% dari total penduduk usia produktif. Kedua, kategori "Sedang" (berbobot 2) jika penduduk usia produktif dengan pendidikan diatas SMA berkisar lebih dari 10% sampai dengan 20% dari total penduduk usia produktif. Ketiga, kategori "Kurang" (berbobot 1) jika penduduk usia produktif dengan pendidikan diatas SMA kurang dari atau sama dengan 10% dari total penduduk usia produktif.

   c. **Jumlah Pengangguran (Atribut Cost)** Jumlah Pengangguran, dilakukan penilaian oleh petugas kecamatan dimana penilaian dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori "Kurang" (berbobot 3) jika jumlah pengangguran lebih dari 20% dari jumlah penduduk usia produktif, yang menunjukkan tingginya masalah ekonomi di wilayah tersebut. Kedua, kategori "Sedang" (berbobot 2) jika jumlah

pengangguran berkisar lebih dari 10% sampai dengan 20% dari jumlah penduduk usia produktif. Ketiga, kategori "Baik" (berbobot 1) jika jumlah pengangguran kurang dari atau sama dengan 10% dari jumlah penduduk usia produktif.

d. **Indeks Pembangunan Manusia / IPM (Atribut Benefit)** Indeks Pembangunan Manusia, dilakukan penilaian oleh petugas kecamatan dimana penilaian dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori "Baik" (berbobot 3) jika skor IPM lebih dari 70. Kedua, kategori "Sedang" (berbobot 2) jika skor IPM berkisar lebih dari 60 sampai dengan 70. Ketiga, kategori "Kurang" (berbobot 1) jika skor IPM kurang dari atau sama dengan 60.

e. **Jumlah Penerima Bantuan Pangan (Atribut Cost)** Jumlah Penerima Bantuan Pangan, dilakukan penilaian oleh petugas kecamatan dimana penilaian dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori "Kurang" (berbobot 3) jika jumlah KK Penerima Bantuan Pangan lebih dari 20% dari total Kepala Keluarga (KK), yang menandakan tingginya tingkat kerawanan pangan. Kedua, kategori "Sedang" (berbobot 2) jika jumlah KK Penerima Bantuan Pangan berkisar lebih dari 10% sampai dengan 20% dari total Kepala Keluarga (KK). Ketiga, kategori "Baik" (berbobot 1) jika jumlah KK Penerima Bantuan Pangan tidak lebih dari 10% dari total Kepala Keluarga (KK).

5. Mekanismenya adalah dengan memilih satu program bantuan pemerintah yang tersedia, kemudian menentukan bobot untuk masing-masing kriteria, dimana masing-masing kecamatan sebelumnya sudah memiliki nilai untuk masing-masing kriteria, kemudian dilakukan perhitungan SPK dengan metode *MOORA* untuk menentukan kecamatan mana yang akan dipriotitaskan untuk program yang di tentukan tersebut.

6. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *Rational Unified Process (RUP).*
7. Aktor dalam sistem ini adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan, Petugas Administrator BAPPEDA Kabupaten Kuningan dan Petugas Administrator Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan
8. Hak akses masing-masing aktor yaitu:
    a. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kuningan dapat meilihat data kecamatan di Kabupaten Kuningan, dan dapat melihat hasil saran dari sistem penunjang keputusan.
    b. Petugas Administrator BAPPEDA Kabupaten Kuningan dapat mengelola data kecamatan di Kabupaten Kuningan, serta dapat menginputkan jenis program pemerintah yang tersedia dan menginputkan bobot niali kriteria, meilhat hasil inputan masing masing kriteria yang dilakukan oleh petugas administrator kecamatan.
    c. Petugas Administrator Kecamatan dapat menginputkan data penilaian masing-masing kriteria untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kuningan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari permasalahan yang dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun sebuah sistem penunjang keputusan dalam menentukan skala prioritas kegiatan Pembangunan
2. Mengimplementasikan metode *MOORA* pada sistem penunjang keputusan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Bagi Peneliti

Mengimplementasikan ilmu yang didapat dari perkuliahaan terutama dalam merancang dan membangun sistem penunjang keputusan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan dengan metode *MOORA* dan metode pengembangan sistem *RUP*.

1.6.2 Bagi BAPPEDA Kabupaten Kuningan

Membantu dalam pengambilan keputusan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

1.7 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang ditanyakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan dibuatnya sistem informasi mengenai kebutuhan daerah kecamatan dan hasil musrembang dapat membantu mensinkronkan di tingkat kecamatan dan kabupaten?
2. Apakah dengan adanya sebuah sistem penunjang keputusan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan dengan metode *MOORA* dapat membantu BAPPEDA Kabupaten Kuningan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan?

1.8 Hipotesis Penelitian

Dengan adanya sistem informasi mengenai kebutuhan daerah baik itu desa maupun kecamatan dan hasil musrembang, serta sistem penunjang keputusan menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan menggunakan metode MOORA, dapat membantu BAPPEDA Kabupaten Kuningan dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan.

1.9 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut juga berhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.9.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Metode Observasi

   Pada metode observasi ini peniliti melakukan pengamatan langsung ke BAPPEDA Kabupaten Kuningan. Hasil observasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan penelitian ini..

2. Metode Wawancara

   Pada metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Dr. Funny Amalia Sari, S.S., M.Hum Selaku Pihak Narasumber dari BAPPEDA Kabupaten Kuningan.

3. Metode Studi Literatur

   Studi Literatur dilakukan untuk menyusun laporan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan berupa pengumpulan informasi yang relevan dan di peroleh dari Literatur RUP, pembuatan web, SPK metode MOORA dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode RUP (*Rational Unified Process*). RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang (*iterative*). Fokus pada arsitektur (*architecture-centric*), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik (well defined) dan penstrukturan yang baik (*well structured*). RUP adalah sebuah produk proses perangkat lunak yang dikembangkan oleh *Rational Software Corporation* yang diakuisisi oleh IBM dibulan Februari 2003.(Ririn et al., 2020)

1.9.3 Metode Penyelesaian Masalah

Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA) ialah sistem multi-tujuan yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini

diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan perhitungan matematis yang kompleks. (Firdaus et al., 2022)

Multi-Objective Optimization on The Basic of Ratio Analysis (MOORA) adalah sistem dengan lebih dari satu tujuan yang memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. Selain itu, metode MOORA mudah dipahami, fleksibel dalam proses evaluasi pembobotan kriteria keputusan, dan sangat selektif karena dapat memastikan target dengan kriteria yang berdampak, yaitu menguntungkan (*benefit*) dan tidak menguntungkan (*cost*). (Ican et al., 2023)

Selain diperkenalkan oleh Brauers dan Zavadkas, metode optimasi multi objektif berbasis rasio analisis (MOORA) juga dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis gangguan pengambilan keputusan yang sangat kompleks. Metode MOORA individu fleksibel dan mudah dipahami. Data yang dapat dimanipulasi oleh sistem ini dapat membantu dalam penilaian masalah yang cepat dan akurat. Metode ini hanya membantu pembuat keputusan daripada bertindak sebagai pengganti mereka.(Febianti Putri et al., 2024)

1.10 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang diusulkan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. *Inception*																				
2. *Elaboration*																				
3. *Construction*																				
4. *Transition*																				
5. *Dokumentation*																				

1.11 Sistematika Penelitian

Dalam Penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan skripsi.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas perancangan sistem terhadap perangkat lunak yang akan dibangun, rancangan input dan output dari aplikasi.

BAB IV : PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini membahas tentang spesifikasi dari aplikasi yang dibuat, tampilan input dan output serta membahas beberapa bagian yang penting dari listing program yang berhubungan dengan matersi Skripsi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yakni kesimpulan terhadap aplikasi yang sudah dibuat secara keseluruhan dan dikemukakan saran-saran (rekomendasi) untuk perbaikan serta pengembangan program.